



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Telp. / Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id) | Email: [dpmptsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmptsp@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 011/PAUD/33.11/II/2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB AMANAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 800/483/2018 dan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/481/2018 tanggal 30 Januari 2018 dinyatakan bahwa pendirian PAUD KB AMANAH yang beralamat di Tegalan RT.004/RW.002, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB AMANAH
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 57);



Menetapkan  
KESATU

## MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama Lembaga : KB AMANAH  
Alamat Lembaga : Tegalan RT.004/RW.002, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo.  
Jenjang Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Pengelola : Nur Widiyastuti  
Alamat : Blimbing RT.005/RW.004, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo.

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
pada tanggal : 22 Februari 2018



KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN SUKOHARJO

AGUSTINUS SETIYONO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018431.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH DESA WONOREJO**

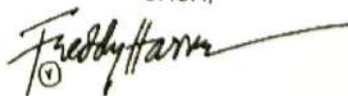
- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH DESA WONOREJO disingkat KB AMANAH DESA WONOREJO tanggal 15 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017121533100733 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH DESA WONOREJO disingkat KB AMANAH DESA WONOREJO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH DESA WONOREJO disingkat KB AMANAH DESA WONOREJO  
berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember  
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022965.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 16 Desember 2017**